

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	12
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	15
1.4. Tujuan Penelitian.....	16
1.5. Manfaat Penelitian.....	17
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.5.2. Manfaat Praktis.....	18
1.6. Keaslian Penelitian.....	18
1.7. Urgensi Penelitian.....	22
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Internet Shutdown Sebagai Instrumen Kebijakan Pembatas HAM.....	25
2.1.1. Definisi Internet Shutdown.....	25
2.1.2. Akses Internet Sebagai Suatu Bagian HAM di Era Digital.....	27
2.1.3. Internet Shutdown Sebagai Alat Kebijakan.....	29
2.2. Keamanan Nasional: Kepentingan Menjaga Ketertiban Umum atau Justifikasi Kebijakan?.....	30
2.3. Masyarakat, Negara, dan <i>Cyber power</i>	35
2.3.1. Otoritarianisme Digital.....	39

2.3.2. Gejolak Politik Daerah Konflik dan Presensi <i>Cyber power</i> Sebagai Elemen Baru.....	41
2.4. Teori Kebijakan Publik.....	42
2.4.1. Tahapan Kebijakan Publik.....	45
2.4.2. Teori Sistem.....	51
2.4.3. Analisis Narasi Kebijakan (<i>Narrative Policy Analysis</i>).....	53
2.5. Proposisi Teoritis.....	55
BAB III: METODE PENELITIAN.....	58
3.1. Pendekatan Penelitian.....	58
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.3. Teknik Analisis Data.....	64
3.3.1. Teknik Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman, 1994).....	64
3.3.2. <i>Narrative Policy Analysis</i> (NPA).....	68
3.4. Waktu Penelitian.....	70
3.5. Hambatan Penelitian.....	70
3.6. Keterbatasan Penelitian.....	71
3.7. Struktur Penulisan Tesis.....	73
BAB IV: GAMBARAN UMUM KONTEKS SOSIO-POLITIK PAPUA DAN PAPUA BARAT.....	76
4.1. Sejarah Singkat Papua dan Papua Barat Sebagai Daerah Konflik.....	77
4.1.1. Akar Konflik Papua.....	78
4.1.2. Otonomi Khusus (Otsus) Sebagai Jalan Tengah Penyelesaian Konflik Papua.....	80
4.2. Pendekatan Keamanan, Hantu Separatisme, dan Konflik Negara Indonesia dengan Daerah Papua.....	84
4.2.1. Tanah Papua dan Dampak dari Pendekatan Keamanan Represif Pemerintah Indonesia.....	85
4.2.2. Meninjau Mitos Pentingnya Pendekatan Keamanan Untuk Penanggulangan Separatisme di Papua.....	86

4.3. Ketertutupan Informasi, Aparat Keamanan, dan Upaya Masyarakat dalam Advokasi Keterbukaan Informasi di Papua.....	91
4.4. Tanah Papua dan Aksesibilitas Internet.....	96
BAB V: POLEMIK KEBIJAKAN INTERNET SHUTDOWN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA AGUSTUS-SEPTEMBER TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.....	103
5.1. Kronologi Kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat.....	104
5.1.1. Pendekatan Keamanan Sebagai Semangat Utama Pengambilan Kebijakan Internet Shutdown.....	117
5.1.2. Problematika Penggunaan Pendekatan Keamanan dalam Pengambilan Kebijakan Internet Shutdown.....	122
5.2. Polemik Kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat tahun 2019 dalam Kerangka Naratif Kebijakan.....	128
5.2.1. Narasi Kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat.....	128
5.2.2. Kontra Narasi.....	144
5.2.3. Analisis Metanarasi.....	152
5.3. Kecacatan proses Pengambilan Kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat tahun 2019.....	155
5.3.1. (De)legitimasi Pemerintah dalam Pengambilan Kebijakan Internet Shutdown.....	158
5.3.2. Hilangnya Komponen Lingkungan Kebijakan dalam Pengambilan Kebijakan Internet Shutdown Dijelaskan dengan Teori Sistem Dye.....	162
BAB VI: DINAMIKA ANTARA MASYARAKAT, NEGARA, DAN CYBER POWER DALAM KEBIJAKAN INTERNET SHUTDOWN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA TAHUN 2019.....	166
6.1. Penggunaan Narasi Keamanan Nasional Sebagai Bentuk Represi Terhadap Tanah Papua.....	167

6.2.	Kehadiran <i>Cyber power Sebagai</i> Elemen Baru dalam Dinamika Elemen- elemen Sistem Kebijakan.....	173
6.3.	Akses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia Vital Pada Era Digital.....	178
6.4.	Indonesia dalam Paradoks Negara Demokrasi dan Otoritarianisme Digital...	182
BAB VII: PENUTUP.....		192
7.1.	Kesimpulan.....	192
7.2.	Rekomendasi.....	196
7.3.	Refleksi.....	199
7.3.1.	Tanah Papua Menuju ke Penggunaan AI dalam Proses Pengambilan Kebijakan.....	200
7.3.2.	Membawa Identitas dalam Pembahasan Kebijakan Internet Shutdown tahun 2019 di Tanah Papua.....	202
DAFTAR PUSTAKA.....		207
LAMPIRAN.....		219